

ANALISIS SISTEM PERKREDITAN USAHATANI TEBU ANALYSIS OF CANE BUSINESS FARM CREDIT SYSTEM

Oleh/By

Agus Wahyudi dan Suci Wulandari

Abstract

Mass credit for cane business farm provided by the government is getting restricted, while its demand is becoming higher. Hence the credit allocation should be focused more in enhancing its effectivity and effeciency. This research aims at analyzing the credit system of cane busines farm by structuring the problem, developing the credit scheme, evaluating the credit insitution, and developing the alternative institutional system. The analysis of farm business is performed in two stages. The first stage is to map the cane area based on its business scale and the second stage is to develop the credit scheme. Likewise credit institution analysis is done in two stages. First is evaluating the credit institution performance and second is developing the alternative credit system institution and to plot the most appropriate available. With regard to the business-scale-based area mapping, it can be learnt that the small farmers (less than 2 has) have a tendency to rent their land. The credit priority is given to small, medium, and large scale of farm business respectively, whereas the financial credit component priority is used for purchasing seed, fertilizer, and pesticide as the main priority, followed by harvest cost, land preparation, irrigation, and living cost, respectively. Cane business credits that have been introduced are, in fact, not effective and efficient.

Key words: scheme, priority, institution, effective, efficiency.

Abstrak

Kredit masal untuk usahatani tebu yang disediakan pemerintah semakin terbatas, sedangkan kebutuhan semakin besar. Oleh karena itu perlu penajaman penerima kredit, sehingga meningkat efektivitas dan efisiensinya. Penelitian bertujuan untuk menganalisis sistem perkreditan usahatani tebu dengan cara memetakan permasalahan, mengembangkan berbagai skema kredit, mengevaluasi lembaga perkreditan, dan mengembangkan alternatif sistem lembaga perkreditan. Analisis terhadap kebutuhan kredit usahatani dilakukan melalui dua tahap yaitu: (1) pemetaan areal tebu berdasarkan skala usaha dan (2) pembuatan skema kredit yang mungkin diterapkan. Analisis terhadap kelembagaan perkreditan dilakukan melalui dua tahap yaitu: (1) evaluasi kinerja kelembagaan perkreditan, (2) mengembangkan alternatif kelembagaan sistem perkreditan dan memproyeksikan kelembagaan yang paling mungkin diterapkan. Berdasarkan atas pemetaan areal berdasarkan atas skala usaha, terlihat adanya kecenderungan petani yang berlahan sempit (kurang dari 2 ha) lebih baik menyewakan lahannya. Prioritas skala usahatani berturut untuk usahatani skala kecil, skala menengah dan skala besar, sedangkan untuk komponen biaya prioritasnya berturut adalah komponen untuk pengadaan benih, pupuk, dan pestisida sebagai prioritas utama disusul oleh biaya panen (tebang angkut), persiapan lahan, pengairan, dan biaya hidup. Kredit usahatani tebu yang pernah diberikan selama ini ternyata tidak efektif dan efisien.

Kata kunci: skema, prioritas, kelembagaan, efektivitas, efisiensi.

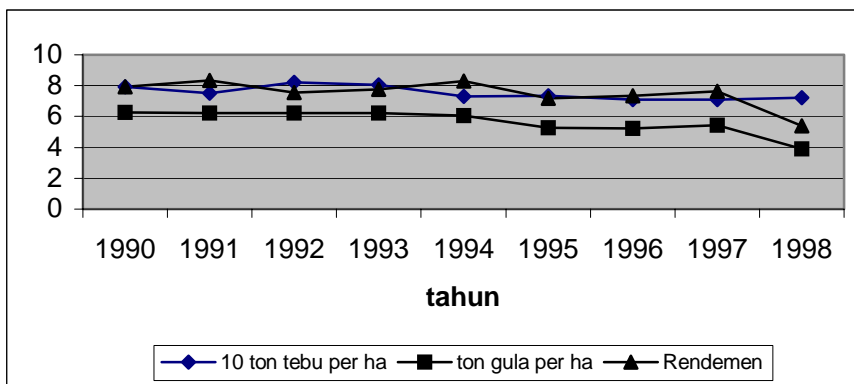
I. PENDAHULUAN

Keterbatasan modal merupakan permasalahan yang paling umum terjadi dalam usaha, terutama bagi usaha kecil seperti usahatani. Dalam usahatani permasalahan tersebut menjadi lebih kompleks antara lain karena persyaratan untuk memperoleh kredit formal sulit dipenuhi oleh petani, risiko usahatani yang tinggi, dan adanya tenggang waktu lama untuk menunggu hasil.

Usahatani tebu termasuk usahatani yang memerlukan bantuan kredit dan telah sejak lama menjadi penerima kredit program pemerintah hingga saat ini. Pada saat ini dan mungkin juga untuk beberapa saat mendatang, sumber pembiayaan pemerintah semakin terbatas sehingga cakupan program kredit yang diberikan pun semakin terbatas juga. Dalam situasi yang demikian maka pemberian kredit harus semakin selektif

Sebagai gambaran, untuk musim tanam tebu 2000/2001 pemerintah hanya sanggup memberikan KKPA TR (Kredit Koperasi Primer Anggota Tebu Rakyat) sebesar Rp 350 milyar dari kesepakatan semula sebesar Rp 1.02 trilyun, itupun belum tentu dapat direalisasikan¹. Tanpa adanya pemberian kredit yang selektif, maksud baik pemerintah untuk meningkatkan kemampuan petani mengadopsi teknologi unggul sulit dicapai atau bahkan mubazir.

Kinerja usahatani tebu yang dicerminkan oleh produktifitas gula per hektar lahan sebagai resultan dari pencapaian rendemen dan produksi tebu, terutama dalam sepuluh tahun terakhir mengalami degradasi yang tajam (Gambar 1).



Gambar 1. Produktifitas lahan untuk gula dan tebu, serta rendemen 1990-1998
Figure 1. The Productivity of Land for Sugar and Cane, and Yield Recovery 1990-1998

Penurunan produktifitas tersebut terjadi terutama karena pengalihan lahan usahatani tebu dari lahan sawah ke lahan tegalan. Walaupun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa aplikasi input yang dilaksanakan petani semakin lama semakin menjauhi standar yang dianjurkan untuk mendekati kinerja potensial, dengan kata lain intensifikasi yang diinginkan tidak terjadi.

¹ Pemerintah tak Mampu Penuhi Kredit Petani Tebu, Berita Kompas, 10 Juli 2000, hal. 13.

Seperti dikemukakan oleh Soentoro *et al.* dalam Sawit *et al.* (1999), bahwa penurunan produktifitas hablur tanaman tebu merupakan indikator kegagalan program intensifikasi tanaman tebu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan kredit melalui Program Tebu Rakyat Intensifikasi yang pernah dilaksanakan tidak efektif dan mubazir.

Berdasarkan pengamatan lapangan kegagalan tersebut lebih karena penyaluran kredit yang kurang tepat, misalnya penerimaan kredit oleh petani yang belum pernah tepat waktu atau selalu terlambat karena prosedurnya sangat panjang dan terlalu rumit bagi petani. Dengan kata lain lembaga-lembaga yang menangani kredit selama ini kurang sesuai dan terlalu banyak yang terlibat. Berdasarkan atas latar belakang tersebut maka permasalahannya adalah bagaimana bantuan kredit dari pemerintah yang sangat terbatas disalurkan agar sampai kepada petani yang paling membutuhkan, dan bagaimana sistem kelembagaan penyaluran kredit yang sesuai, agar petani dapat menerima kredit secara tepat (waktu dan jumlah).

Berdasarkan atas permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk memetakan areal usahatani tebu berdasarkan skala usaha yang diperkirakan layak untuk menerima kredit dari pemerintah untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengadopsi teknologi unggul, dan mengevaluasi lembaga perkreditan yang pernah digunakan sebagai sistem penyaluran dan pengembalian kredit pemerintah.

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Kerangka Pemikiran

1. Pemetaan Areal Penerima dan Kebutuhan Kredit

Pemberian bantuan kredit secara massal seperti yang selama ini dilaksanakan diperkirakan tidak efektif, karena tidak semua usahatani perlu bantuan. Usahatani dengan skala usaha menengah (2-5 ha) dan besar (lebih dari 5 ha) pada umumnya sudah memiliki kemampuan untuk memperoleh modal secara mandiri, baik modal sendiri ataupun kredit.

Usahatani tebu di Jawa dengan skala menengah dan besar pada umumnya usahatani yang sudah komersil, dimana terlihat dari kemampuannya untuk menyewakan lahan. Bahkan usahatani yang besar pada umumnya tidak hanya mengusahakan satu komoditas.

Perlu ditegaskan bahwa kredit tidak merupakan syarat mutlak dalam pembangunan pertanian. Hal yang penting adalah mendorong petani untuk menggunakan barang-barang modal dan penemuan teknologi baru untuk meningkatkan produksi pertanian dan sarana produksi di dekat petani (Mosher, 1968). Mubyarto (1994) dan Penry (1975) mengemukakan bahwa secara teoritis penggunaan modal yang lebih banyak dalam usaha intensifikasi pertanian tidaklah dapat disamakan dengan penggunaan kredit yang lebih banyak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kredit memang diperlukan, tetapi tidak mutlak.

Keterbatasan dana bantuan kredit yang disediakan pemerintah, seperti yang telah digambarkan, menjadi faktor pendorong untuk mengalokasikan kredit kepada

usahatani yang benar-benar membutuhkannya, terutama usahatani skala kecil (UK). Sedang usahatani skala menengah (UM) dan usahatani skala besar (UB) dapat dipertimbangkan secara selektif jika dana masih mencukupi. Tetapi pada dasarnya UM dan UB telah mampu untuk membiayai produksi secara mandiri baik melalui pembiayaan internal maupun pembiayaan eksternal.

Pemetaan areal secara makro untuk memperoleh gambaran kebutuhan bantuan kredit dapat dilacak dengan pembuatan proyeksi luas areal usahatani yang perlu bantuan kredit dan skema kredit yang ditawarkan.

Dalam perancangan skema kredit perlu mempertimbangkan hasil-hasil penelitian untuk usahatani kecil seperti kesimpulan Wharton dalam Ronodiwirjo (1969) yaitu:

- a. Pemberian kredit usahatani perlu untuk memungkinkan petani melakukan inovasi-inovasi usahatannya.
- b. Kredit harus dinamis yaitu mendorong petani untuk menggunakannya secara produktif dengan bimbingan dan pengawasan yang teliti.
- c. Kredit yang diberikan selain berfungsi sebagai bantuan modal juga merupakan perangsang untuk menerima bimbingan teknik.

2. Kelembagaan Perkreditan.

Seperti telah duraikan bahwa penyaluran kredit massal yang terjadi selama ini tidak efektif, sehingga penggunaan kredit tersebut tidak lagi sesuai dengan tujuan pemberian kredit. Oleh karena itu bila bantuan kredit yang akan datang tetap disalurkan dengan sistem kelembagaan yang sama, maka akan mengulang kesalahan dan menciptakan kemunduran. Dengan kata lain diperlukan suatu perubahan sistem.

Ketidaktepatan waktu penyaluran kredit, kemungkinan karena terlalu banyak lembaga yang terlibat dalam penyaluran itu, sehingga ada lembaga yang bertindak sebagai pemburu rente. Selain itu sistem yang demikian akan menciptakan biaya transaksi yang besar, yang pada akhirnya menyebabkan semakin besarnya tanggungan petani. Secara singkat, sistem yang demikian tidak efektif dan efisien. Menurut *Sugar Industry Development Team* (1999) kebanyakan skema kredit yang dioperasikan sekarang terlalu rumit dan sulit. Seringkali melibatkan lembaga dan organisasi yang tidak diperlukan, sehingga menyebabkan keterlambatan kredit yang seharusnya diterima petani pada waktu dibutuhkan. Keterlambatan ini mengakibatkan penundaan tanam, pemupukan dan pemeliharaan yang tidak sesuai dengan anjuran, dan panen muda yang menyebabkan produktifitas dan kualitas tidak mencapai apa yang diharapkan.

Mubyarto (1994) mengatakan bahwa kredit melalui koperasi tidak begitu berhasil karena prosedur yang dianggap terlalu berbelit-belit. Dalam hal ini koperasi merupakan “perantara” saja dari pemberi kredit kepada anggotanya. Tetapi justru karena hubungan yang tidak langsung antara petani dan bank, maka pengembaliannya menjadi tidak lancar. Oleh karena itu perlu kiranya meninjau kembali format lembaga kredit dengan hanya melibatkan lembaga-lembaga yang langsung peranannya dan menghilangkan lembaga-lembaga “perantara” yang bertindak sebagai pemburu rente dan “free rider”.

B. Metoda Pengumpulan Data

Data sekunder yang diperlukan sebagai data dasar antara lain adalah data luas areal yang terinci dengan pembagian Jawa-Luar Jawa, Tebu PG-Tebu Rakyat, sawah-tegalan, *plant cane-ratoon*, dan skala usaha. Luas areal menurut skala usaha dihitung berdasarkan proporsi masing-masing skala usaha yang diproyeksikan melalui survei di tiga wilayah PG di Jawa Timur.

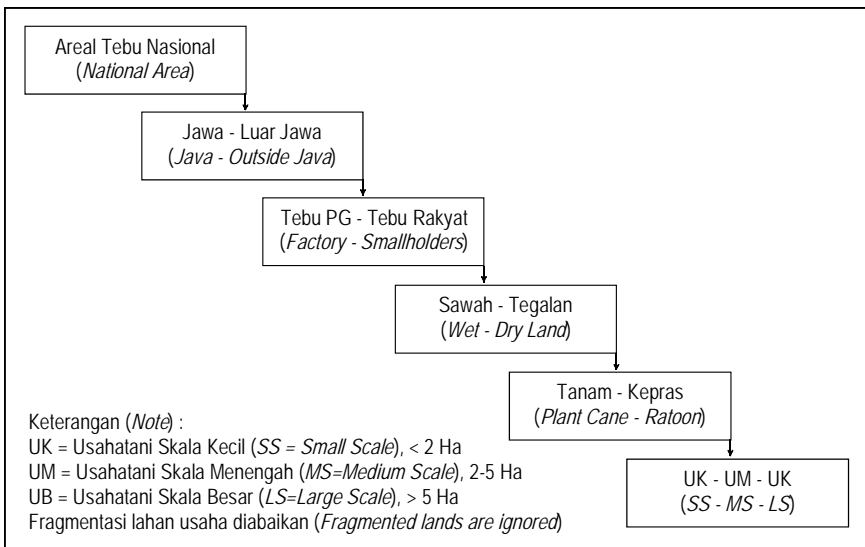
Dalam evaluasi kinerja sistem kelembagaan dan pengembangan alternatif sistem kelembagaan digunakan data primer yang diperkirakan dapat berkinerja baik. Data ini diperoleh dari jajak pendapat dari petani yang pernah memperoleh kredit pada tiap skema penyaluran dan pengembalian kredit usahatani tebu yang pernah ada.

Untuk memperoleh pendapat tentang urutan kepentingan dari setiap komponen kredit digunakan pendapat panelis yang dipilih dari para petani maju. Sedangkan untuk memperoleh pendapat efektivitas dari setiap pola kredit diambil secara acak sebanyak 100 petani yang pernah menerima kredit.

C. Metoda Analisis

1. Pemetaan Areal Penerima dan Kebutuhan Kredit

Untuk menganalisis kebutuhan kredit usahatani tebu, ada dua variabel yang perlu diketahui, yaitu luas areal yang membutuhkan bantuan kredit yang terinci menurut skala usaha dan skema kredit yang juga terinci menurut skala usaha. Oleh karena itu perlu dua langkah analisis yaitu: (a) Pemetaan areal tebu berdasarkan skala usaha, dan (b) Pembuatan skema kredit yang mungkin untuk diterapkan.



Gambar 2. Prosedur Proyeksi secara Deduktif Pemetaan Luas Areal Usahatani yang Memerlukan Kredit.

Figure 2. Procedure of Farm Area Projection That Need the Credit

Pemetaan areal tebu dilakukan dengan cara membedakan areal tebu nasional di Jawa dan Luar Jawa. Areal Jawa kemudian berdasarkan kepemilikannya dibedakan menjadi tebu PG dan tebu rakyat. Tebu rakyat kemudian berdasarkan jenis lahannya dibedakan menjadi lahan sawah dan tegal, untuk kemudian masing-masing lahan dirinci berdasarkan tanaman tebu tanam dan kepras (*plant cane* dan *ratoon*), dan secara khusus dilihat berdasarkan jenis pengusahaannya (usahatani kecil, menengah, dan besar) (Gambar 2).

Pembuatan skema kredit yang mungkin diterapkan disusun berdasarkan pertimbangan kebutuhan biaya dari setiap jenis usahatani dan dana yang tersedia. Kebutuhan biaya dalam usahatani meliputi biaya untuk persiapan dan pemeliharaan lahan, pembelian sarana produksi berupa benih, pupuk, pestisida, pengairan, serta biaya hidup. Selain itu juga tenaga kerja untuk penebangan tebu dan pengangkutan ke pabrik gula. Komponen-komponen biaya tersebut dijadikan komponen kredit berdasarkan atas prioritas kepentingan bagi usahatani. Untuk menyusun prioritas tersebut dimintakan pendapat dari 10 panelis (petani maju) dari tiga pabrik gula di Jawa Timur.

2. Kelembagaan Perkreditan

Analisis kelembagaan perkreditan dilakukan melalui dua tahap yaitu:

1. Evaluasi kinerja kelembagaan perkreditan yang pernah berperan dalam penyaluran dan pengembalian kredit usahatani tebu.
2. Mengembangkan alternatif kelembagaan sistem perkreditan usahatani tebu dan memproyeksikan kelembagaan yang paling mungkin untuk diterapkan, berdasarkan atas hasil evaluasi yang telah dilakukan.

Dalam evaluasi kinerja kelembagaan ini digunakan kerangka Dawson (1996), yang menggunakan dua indikator yaitu efektifitas dan efisiensi. Efektifitas merupakan kemampuan kelembagaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini dapat dilihat ketepatan waktu dan jumlah penyaluran dan pengembalian kredit.

Secara umum efisiensi merupakan rasio dari nilai input dengan nilai output. Suatu sistem kelembagaan dapat disebut efisien jika setiap elemen lembaga tersebut memberikan kontribusi neto yang positif terhadap sistem. Yang dimaksud dengan elemen lembaga adalah pelaku-pelaku baik individu atau kelompok berikut dengan peran dan aturan main yang telah disepakati. Secara operasional suatu sistem kelembagaan dapat menjadi tidak efisien jika ada elemen lembaga yang hanya bertindak sebagai pencari rente belaka (menyebabkan biaya transaksi bertambah) atau keberadaannya hanya sebagai *free rider* atau perannya tidak diperlukan. Biasanya **keberadaan elemen lembaga** ini hanya berlindung di balik peraturan pemerintah.

Dalam mengembangkan alternatif kelembagaan, Dawson (1996), mengemukakan bahwa keberhasilan suatu sistem kelembagaan akan sangat tergantung dari persepsi sosial dari elemen-elemen lembaga yang terlibat di dalamnya, paling tidak dalam jangka pendek sebelum elemen lembaga yang bersangkutan merubah citra dirinya. Secara operasional setiap elemen lembaga dapat dievaluasi dengan melihat

persepsi petani tentang **kesesuaian perilaku** setiap elemen lembaga yang terlibat dalam sistem kelembagaan perkreditan dengan perilaku yang seharusnya diperankannya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemetaan Area Penerima dan Kebutuhan Kredit

Berdasarkan atas proyeksi peta luas areal terlihat bahwa usahatani tebu pada saat ini sebageian besar merupakan usahatani dengan skala menengah (Tabel 1). Ciri dari usahatani skala menengah ini adalah petaninya merupakan petani yang tangguh dan memiliki jiwa kewiraswastaan yang tinggi, karena lahan usahatannya merupakan lahan sewaan. Dengan kata lain mereka memiliki kemampuan untuk menanggung risiko, dan mampu dengan cermat berhitung untung dan rugi usaha.

Tabel 1. Proyeksi Peta Luas Areal Tebu yang disegmentasi Tahun 2000/2001 (dalam ribu ha)

Table 1. Projection of segmented cane area map in 2000/2001 (in thousand ha)

Tahap 0 <i>Step 0</i>	Tahap 1 <i>Step 1</i>	Tahap 2 <i>Step 2</i>	Tahap 3 <i>Step 3</i>	Tahap 4 <i>Step 4</i>	Tahap 5 <i>Step 5</i>		
Nasional <i>(National)</i> (376.1)	Jawa <i>(Java)</i> (245.2)	Rakyat <i>(Small-holders)</i> (192.7)	Kecil <i>(Small)</i> (67.0)	Sawah <i>(Wetland)</i> (30.4)	<i>TT (PC)</i> 9.2 <i>K (R)</i> 21.2		
				Tegal <i>(Dryland)</i> (36.6)	<i>TT (PC)</i> 11.0 <i>K (R)</i> 25.6		
			Menengah <i>(Medium)</i> (123.3)	Sawah <i>(Wetland)</i> (67.0)	<i>TT (PC)</i> 20.1 <i>K (R)</i> 46.9		
				Tegal <i>(Dryland)</i> (56.3)	<i>TT (PC)</i> 16.9 <i>K (R)</i> 39.4		
			Besar <i>(Large)</i> (33.6)	Sawah <i>(Wetland)</i> (18.3)	<i>TT (PC)</i> 5.5 <i>K (R)</i> 12.8		
				Tegal <i>(Dryland)</i> (15.3)	<i>TT (PC)</i> 4.6 <i>K (R)</i> 10.7		
		PG <i>(Factories)</i> (52.5)					
		Luar Jawa <i>(Outside Java)</i> (130.9)					

Sumber *(Source)*: Sekretariat Dewan Gula Indonesia *(Secretary of Indonesian Sugar Council)*, 2000

Keterangan *(Note)*: TT = Tebu Tanam (PC = *Plant Cane*); K = Keprasan (R = *Ratoon*)

Selain itu kebanyakan para petani menengah ini merupakan penduduk setempat, sehingga kredibilitasnya sudah sangat dikenal di kalangan petani lain yang akan menyewakan lahannya. Bahkan ada kecenderungan dalam dasawarsa terakhir para petani kecil lebih baik menyewakan lahannya kepada para petani menengah dan

besar, sedangkan mereka sendiri merasa lebih baik menjadi buruh tani atau mencari pekerjaan di luar sektor pertanian. Pekerjaan utama petani menengah ini pada umumnya masih sebagai petani tebu. Sebaliknya para petani besar pada umumnya mengusahakan beberapa komoditas, bahkan juga berusaha di luar sektor pertanian terutama perdagangan, sehingga pada umumnya tinggal di daerah perkotaan.

Tabel 2. Pendapat panelis tentang tingkat kepentingan dari tiap komponen biaya untuk dijadikan komponen kredit

Table 2. Panelists' Opinion on the Level Importance of Component of Cost to be Financed by Credit.

Kode Panelis (Code of Panelists)	Komponen Biaya (Component of Cost)						
	Persiapan Lahan (Land Preparation)	Benih (Seedling)	Pupuk (Fertilizer)	Pestisida (Pesticides)	Air (Irrigation)	Panen (Harvesting)	Biaya Hidup (Cost of Living)
A	3	3	3	3	2	3	2
B	3	3	3	3	2	3	3
C	3	3	3	3	2	3	3
D	3	3	3	3	3	3	3
E	3	3	3	3	3	3	2
F	2	3	3	3	3	2	1
G	3	3	3	3	2	3	1
H	2	3	3	3	1	3	2
I	2	3	3	3	2	3	1
J	3	3	3	3	2	3	1
<i>Jumlah (Total)</i>	27	30	30	30	22	29	19
<i>Peringkat (Ranking)</i>	3	1	1	1	4	2	5

Keterangan (Note): 3 = Sangat Penting (*very important*); 2= Penting (*important*); 1= kurang Penting (*less important*); 0 = tidak penting (*not important*)

Gambaran tersebut semakin memperkuat argumentasi bahwa sebenarnya tidak semua petani harus diberikan bantuan kredit pemerintah mengingat sebagian petani memiliki kemampuan untuk membiayai secara mandiri usahataniya. Dengan kata lain yang pasti membutuhkan kredit adalah UK dan kemungkinan juga sebagian dari UM. Dengan demikian pemberian kredit yang selama ini dilakukan kemungkinan terlalu besar dan skema yang diberikan bukan atas dasar klasifikasi usahatani tetapi lembaga penyalur kredit (Tabel 2).

Skema kredit disusun berdasarkan atas prioritas skala usahatani dan komponen biaya. Urutan prioritas skala usahatani adalah UK, UM, kemudian UB. Sedangkan urutan prioritas komponen kredit menurut pendapat para panelis secara berturut-turut adalah pengadaan sarana produksi, penebangan dan pengangkutan tebu, persiapan lahan, pengairan, dan biaya hidup (Tabel 3).

Tabel 3. Skema Kredit Usahatani Tebu menurut Skala Usaha dan Penggunaan
Table 3. Credit Scheme for Cane Farm according to Scale and Utilization

Skema (Scheme)	Skala Usaha (Scale)	Komponen Biaya (Components of Cost)						
		Benih (Seedling)	Pupuk (Fertilizer)	Pestisida (Pesticide)	Panen (Harvest)	Persiapan Lahan (Land Preparation)	Air (Irigation)	Biaya Hidup (Cost of Living)
I	UK (SS)	√	√	√	√	√	√	√
	UM (MS)	√	√	√	√	X	X	X
	UB (LS)	X	X	X	X	X	X	X
II	UK (SS)	√	√	√	√	√	X	X
	UM (MS)	√	√	√	X	X	X	X
	UB (LS)	X	X	X	X	X	X	X
III	UK (SS)	√	√	√	√	√	X	X
	UM (MS)	X	X	X	X	X	X	X
	UB (LS)	X	X	X	X	X	X	X

Keterangan (Note): √= diberikan kredit (*supplied*); X = tidak diberikan kredit (*not supplied*)
 UK= Usahatani Skala Kecil (*SS = Small Scale*), < 2 ha
 UM = Usahatani Skala Menengah (*MS = Medium Scale*), 2-5 ha
 UB= Usahatani Skala Besar (*LS = Large Scale*), > 5 ha
 Fragmentasi lahan usaha diabaikan (*fragmented lands are ignored*)

Skema I, UK diberikan semua komponen kredit, termasuk biaya hidup. UM diberikan biaya pengadaan sarana produksi, serta biaya penebangan dan pengangkutan, sedangkan UB tidak diberikan kredit. Argumentasi dari Skema I ini adalah bahwa UK merupakan sasaran utama dalam program perkreditan, oleh karena itu semua komponen dibiayai kredit. UM sebagai penerima kredit prioritas kedua, diberi kredit untuk membiayai pembelian sarana produksi dan biaya panen. UB dianggap mampu untuk membiayai usahatannya.

Skema II, komponen biaya hidup dan pengendalian air dikeluarkan dari paket kredit untuk UK dengan asumsi bahwa biaya hidup dapat dibiayai dari berbagai usaha diluar usahatani tebu, demikian juga dengan pengendalian air. Pada UM hanya disediakan biaya input. Seperti Skema I UB dianggap mampu membiayai usahatannya.

Skema III, UK mendapatkan pembiayaan kredit tanpa komponen biaya hidup dan pengendalian air. UB dan UM tidak mendapatkan kredit karena dianggap mampu untuk membiayai usahatannya baik melalui pembiayaan internal maupun eksternal secara mandiri. Skema III ini digunakan jika dana yang disediakan pemerintah memang sangat terbatas.

Berdasarkan atas ketiga skema kredit yang telah disusun dapat diperkirakan besarnya satuan kredit (kredit tiap ha usahatani) menurut skala usaha, jenis lahan dan tebu tanam-kepras (Lampiran 1-3). Proyeksi kebutuhan kredit yang rinci dan total (Tabel 4), dapat diperoleh dengan penggabungan angka satuan pada lampiran dengan peta luas areal pada Tabel 1.

Tabel 4. Proyeksi Kebutuhan Kredit Total dari Tiga Skema Kredit untuk MT 2000/2001

Table 4. Projection of The Total Credit Needed for Three Credit Sceme for Planting Seasons 2000/2001

Skala Usaha (Scale)	Lahan (Land)	Tanam/Kepras (PC/R)	Luas Areal Area (ha)	Skema I		Skema II		Skema III	
				Satuan Kredit (Unit of Credit), Rp1 000/ha	Kredit Total (Total Credit), juta rupiah	Satuan Kredit (Unit of Credit), Rp1 000/ha	Kredit Total (Total Credit), juta rupiah	Satuan Kredit (Unit of Credit), Rp1 000/ha	Kredit Total (Total Credit), juta rupiah
UK (SS)	Sawah (Welland)	TT (PC)	9 202	6 650	61 193	6 100	56 132	6 100	56 132
		K (R)	21 207	5 450	115 578	4 900	103 914	4 900	103 914
	Tegal (Dryland)	TT (PC)	10 969	6 350	69 653	5 500	60 330	5 500	60 330
		K (R)	25 595	5 300	135 654	4 450	113 898	4 450	113 898
UM (MS)	Sawah (Welland)	TT (PC)	20 111	4 100	82 455	2 500	50 278	0	0
		K (R)	46 925	3 300	154 853	1 700	79 773	0	0
	Tegal (Dryland)	TT (PC)	16 880	4 100	69 208	2 500	42 200	0	0
		K (R)	39 386	3 300	129 974	1 700	66 956	0	0
UB (LS)	Sawah (Welland)	TT (PC)	5 485	0	0	0	0	0	0
		K (R)	12 798	0	0	0	0	0	0
	Tegal (Dryland)	TT (PC)	4 604	0	0	0	0	0	0
		K (R)	10 742	0	0	0	0	0	0
Total					818 568		573 480		334 274

Keterangan (Note): Uraian Satuan kredit dari masing-masing Skema terlampir pada Lampiran 1-3 dan singkatan seperti Tabel sebelumnya (For the detail of unit of credits see Appendices 1-3 and abbreviation as the prior tables)

Dengan melihat ketiga skema kredit yang ditawarkan dapat diketahui skema mana yang paling mungkin untuk diterapkan sesuai dengan pagu yang disediakan pemerintah. Seperti telah diberitakan bahwa untuk MT 2000/2001 pemerintah hanya menyediakan kredit sebesar kurang-lebih Rp 350 milyar, sehingga hanya skema III yang paling mungkin diterapkan. Perlu diketahui bahwa kredit ini tidak selamanya akan diberikan kepada petani. Selain itu paket kredit yang diberikan perlu disertai kesanggupan petani untuk menerapkan paket teknologi yang direkomendasikan oleh lembaga penelitian. Setelah pelaksanaan kredit harus diadakan evaluasi apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai, secara bertahap kredit akan semakin dikurangi sesuai dengan pencapaian tujuan tersebut. Dalam jangka menengah dan panjang kredit kemungkinan dapat diberikan dalam bentuk yang lain, misalnya kredit untuk pengembangan teknologi baru, kredit untuk pengembangan lembaga-lembaga produksi atau pemasaran dan sebagainya.

B. Kelembagaan Perkreditan

Berdasarkan atas skema penyaluran dan pengembalian kredit yang pernah diterapkan, terlihat beberapa pola yang melibatkan banyak lembaga seperti pada

Pola Kredit Kelompok Tani yang sampai melibatkan enam lembaga, dimana empat diantaranya memiliki peran yang sama yaitu koordinator (Tabel 5). Seperti telah dikatakan sebelumnya bahwa semakin banyak lembaga yang terlibat semakin besar peluang sistem kelembagaan menjadi tidak efektif dan efisien. Fungsi koordinasi yang dilakukukan secara hierarkhi justru malah berpeluang terjadinya mismanajemen yang semakin besar. Apalagi terlihat bahwa lembaga-lembaga yang terlibat tersebut merupakan lembaga yang tidak memiliki hubungan fungsional yang kuat, sehingga sulit dijalin kerjasama yang harmonis, karena adanya perbedaan motivasi dari setiap individu dalam lembaga-lembaga tersebut.

Tabel 5. Sistem Kelembagaan Kredit Usahatani Tebu yang Pernah Ada dan Peran Setiap Elemen Lembaga yang terlibat.

Table 5. The Existing Credit Institution System for Cane Farms and Roles of Each Institution

Pola Kredit (<i>Pattern of Credits</i>)	Alur (<i>Channel</i>)	Lembaga Terlibat (<i>Involved Institutions</i>)	Tingkat Bunga (<i>Interest Rate</i>)	Peran (<i>Role</i>)
KUD Murni	Petani → KUD → BRI → <u>Kredit</u> → KUD → Petani	Petani (<i>Farmers</i>)	-16 %	Debitur (<i>Borrower</i>)
		KUD (<i>Cooperatives</i>)	2%	Koordinator (<i>Coordinator</i>)
		BRI (<i>Bank</i>)	14%	PenyalurKredit (<i>Creditor</i>)
KUD Mitra	Petani → KUD → PG → <u>Jaminan</u> → BRI → <u>Kredit</u> → PG → Petani	Petani (<i>Farmers</i>)	-16 %	Debitur ((<i>Borrower</i>)
		KUD (<i>Cooperatives</i>)	1%	Koordinator (<i>Coordinator</i>)
		PG (<i>Sugar factory</i>)	1%	Koordinator (<i>Coordinator</i>)
		BRI (<i>Bank</i>)	14%	PenyalurKredit (<i>Creditor</i>)
Kredit PG	Petani → PG → <u>Kredit</u> → Petani	Petani (<i>Farmers</i>)	-16 %	Debitur (<i>Borrower</i>)
		PG (<i>Sugar factory</i>)	16%	Kreditor, Koordinator (<i>Creditor, Coordinator</i>)
Kelompok Tani	Petani → Kepala Desa → KUD → PG → Dinas Perkebunan → BRI → <u>Kredit</u> → PG → Sinder → Petani	Petani (<i>Farmers</i>)	-16 %	Debitur (<i>Borrower</i>)
		Kepala Desa (<i>Village Leader</i>)	-	Koordinator (<i>Coordinator</i>)
		KUD (<i>Cooperatives</i>)	1%	Koordinator (<i>Coordinator</i>)
		PG (<i>Sugar factory</i>)	1%	Koordinator (<i>Coordinator</i>)
		Dinas Perkebunan (<i>Gov' Office of Estate Crops</i>)	-	Koordinator (<i>Coordinator</i>)
		BRI (<i>Bank</i>)	14%	Penyalur Kredit (<i>Creditor</i>)

Sehubungan dengan hal tersebut Robbins (1994) mengemukakan bahwa deferensiasi vertikal merujuk pada kedalaman struktur. Diferensiasi meningkat, demikian pula kompleksitasnya, karena jumlah tingkatan hierarkhi bertambah. Makin banyak tingkatan, makin besar pula potensi terjadinya distorsi dalam

komunikasi, dan makin sulit mengkoordinasi pengambilan keputusan dan pengawasan. Dengan kata lain dengan semakin banyaknya koordinator dan pengawas dalam sistem kelembagaan kredit, akan semakin kompleks sistem tersebut sehingga tidak dapat beroperasi secara maksimal.

Secara jelas dapat dilihat bahwa sebenarnya peran koordinator dapat dilakukan oleh satu lembaga saja yaitu PG. Hal ini karena PG secara langsung memiliki kepentingan berupa terjaminnya pasokan bahan baku tebu, dan PG secara hierarkhis memiliki aparat untuk menjangkau petani dan memiliki informasi yang relatif lengkap tentang situasi dan kondisi petani, sampai ke tingkat individu.

Kredit dengan pola KUD Murni dalam penyalurannya dirasakan tidak pernah tepat, baik waktu dan jumlah oleh sebagian besar nasabahnya (Tabel 6). Kredit PG relatif lebih baik, sebagian besar petani menyatakan bahwa kredit yang disalurkan kadang-kadang tepat waktu, namun tidak pernah tepat jumlah. Kredit dengan pola KUD Mitra, waktu penyaluran kredit kadang-kadang tepat, namun jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan kredit Kelompok Tani sebagian besar petani menyatakan tidak pernah tepat waktu dan tepat jumlah. Secara keseluruhan, hanya sebagian kecil petani menyatakan bahwa kredit yang disalurkan kadang-kadang tepat waktu dan jumlah, namun demikian sebagian besar petani menyatakan tidak tepat waktu dan jumlah. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran kredit yang selama ini dilaksanakan tidak efektif atau tidak sesuai dengan harapan, baik pemerintah maupun petani.

Tabel 6. Efektifitas Perkreditan Usahatani berdasarkan Berbagai Skema yang diluncurkan

Table 6. Effectiveness of Farm Credits according to Their Schemes

Pola Kredit (<i>Pattern of Credits</i>)	Ketepatan Waktu (<i>Fitness of Time</i>)				Ketepatan Jumlah (<i>Quantity Appropriateness</i>)			
	Selalu (<i>Always</i>)	Kadang-Kadang (<i>Seldom</i>)	Tidak Pernah (<i>Never</i>)	Tidak Tahu (<i>Not Know</i>)	Selalu (<i>Always</i>)	Kadang-Kadang (<i>Seldom</i>)	Tidak Pernah (<i>Never</i>)	Tidak Tahu (<i>Not Know</i>)
KUD Murni	0	30	61	9	0	21	75	4
KUD Mitra	0	41	57	2	0	26	69	5
Kredit PG	0	62	34	4	0	29	65	6
Kelompok Tani	0	11	86	3	0	16	80	4
Rata-rata (<i>Average</i>)	0	36	59.5	4.5	0	23	72.3	4.8

Dilihat dari peran lembaga-lembaga yang terlibat, tidak ada peran pengendalian dalam sistem, yang menonjol hanya peran koordinator. Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa pola-pola kredit yang pernah dikembangkan tidak efisien dan efektif. Oleh karena itu pemberian kredit yang akan datang harus diubah pola dan juga skemanya. Pemberian kredit dengan pola yang terlalu umum sudah tidak lagi dapat diterapkan, dan lembaga-lembaga yang diperkirakan tidak memiliki kontribusi positif yang nyata, lebih baik ditiadakan.

Tabel 7. Persepsi Petani tentang Keberadaan Lembaga dalam Sistem Perkreditan Usahatani Tebu

Table 7. Farmers' Perception on the Existing Institution in The Credits System for Cane Farms

Lembaga (Institutions)	Persepsi (Perception)			
	Sangat Perlu (Strongly needed)	Perlu (Needed)	Tidak Perlu (Unneeded)	Tidak tahu (Do not Know)
Kelompok Tani (Farmers Group)	23	23	49	5
Kepala Desa (Head of Village)	0	0	98	2
KUD (Cooperatives)	8	34	52	6
PG (Sugar Factory)	48	32	18	2
Dinas Perkebunan (Gov't Office of Estate)	4	18	66	12
Bank (Bank)	78	6	0	16

Lembaga yang dianggap perlu keberadaannya oleh petani dalam pencairan kredit antara lain Kelompok Tani, PG, dan Bank. Kelompok tani masih diperlukan keberadaannya dengan peran sebagai koordinator (Tabel 7). Secara kolektif, para petani akan menggunakan kelompok tani sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dan memenuhi kebutuhannya. PG masih diperlukan keberadaannya dengan peran sebagai penjamin. PG merupakan lembaga yang mengetahui dengan baik kegiatan teknis usahatani dan kondisi aktual di areal usahatani. Sebagai penjamin, PG akan memudahkan petani dalam memperoleh kredit. Bank masih diperlukan keberadaannya dengan peran sebagai kredit pelaksana, yang menyalurkan kredit dari lembaga keuangan.

Kepala Desa, KUD, dan Dinas Perkebunan, oleh sebagian besar petani dianggap sudah tidak diperlukan lagi. Peran Kepala Desa sebagai koordinator dan sebagai pejabat pemerintah, kadang-kadang justru menghambat penyaluran kredit secara adil. Pemimpin formal seperti Kepala Desa sebaiknya tidak lagi dilibatkan, karena Kepala Desa adalah jabatan politik di desa sehingga besar kemungkinan terjadi 'pilih kasih' dalam pemberian kredit.

Tabel 8. Persepsi Petani tentang Peran Lembaga Perkreditan

Table 8. Farmers Perception about The Role of Credit Institution

Lembaga (Institutions)	Peran (Role)	Tingkat Kesesuaian (Appropriateness)			
		Sangat Sesuai (Very Appropriate)	Sesuai (Appropriate)	Tidak Sesuai (Not Appropriate)	Tidak tahu (Do not Know)
Kelompok Tani (Farmers Group)	Koordinator (Coordinator)	9	52	34	5
Kepala Desa (Head of Village)	Koordinator (Coordinator)	8	21	69	2
KUD (Cooperatives)	Koordinator (Coordinator)	8	31	58	3
PG (Sugar Factory)	Penjamin (Assurance)	26	63	8	3
Dinas Perkebunan (Gov't Office of Estate Crops)	Koordinator (Coordinator)	0	9	87	4
Bank (Bank)	Penyalur Kredit (Creditor)	76	11	8	5

Sebagaimana persepsi tentang keberadaan lembaga penyalur kredit, persepsi petani tentang kesesuaian peranan menunjukkan kecenderungan yang serupa (Tabel 8). Diantara lembaga penyalur kredit yang ada hanya PG dan kelompok tani yang dipersepsikan sebagian besar petani berperan sesuai dengan harapannya. Hal ini menunjukkan semakin tidak relevan kredit KKPA untuk tebu yang menjadikan koperasi sebagai pemeran utama. Dalam hal ini sebaiknya PG yang mengambil peranan tersebut. Bila koperasi masih ingin dipertahankan maka perlu adanya reevaluasi dari setiap KUD, apakah KUD tersebut masih diterima para anggotanya atau tidak.

Dari gambaran tersebut terlihat bahwa lembaga yang perlu dilibatkan dalam sistem perkreditan usahatani tebu hanya lembaga yang memiliki peran yang langsung, bukan peran perantara. Peran seperti koordinator saja perlu dihilangkan karena hanya akan mendistorsi komunikasi dan bertindak sebagai pemburu rente. Jadi lembaga dan peran yang dapat dipertimbangkan untuk menangani perkreditan usahatani tebu adalah lembaga keuangan (penyalur kredit dari pemerintah), lembaga penjamin dan koordinator (asuransi dan atau PG), lembaga pengawas/pengendali (lembaga yang mewakili kepentingan pemerintah, PG dan petani).

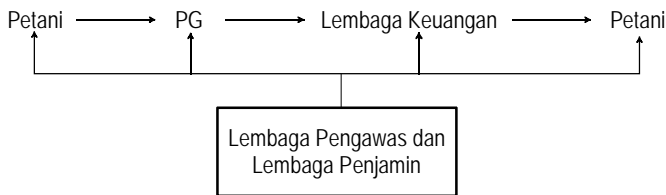
IV. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan atas pemetaan areal berdasarkan atas skala usaha, terlihat adanya kecenderungan petani yang berlahan sempit (kurang dari 2 ha) lebih baik menyewakan lahannya untuk berusahatani tebu kepada petani lain sehingga satuan usahatani tebu menjadi semakin luas, dan sebagian besar menjadi 2-5 ha setiap usahatani.
2. Skema kredit usahatani tebu, didasarkan atas klasifikasi skala usahatani dan komponen biaya yang diurutkan berdasarkan tingkat kepentingannya. Prioritas skala usahatani berturut untuk usahatani skala kecil, skala menengah dan skala besar, sedangkan untuk komponen biaya prioritasnya berturut adalah komponen untuk pengadaan benih, pupuk, dan pestisida sebagai prioritas utama disusul oleh biaya panen (tebang angkut), persiapan lahan, pengairan, dan biaya hidup.
3. Kredit usahatani tebu yang pernah diberikan selama ini ternyata tidak efektif dan efisien. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa sebagian besar penerima kredit menyatakan bahwa kredit yang pernah diterima tidak pernah tepat waktu dan tepat jumlah, sehingga penggunaan kredit tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya. Selain itu dinyatakan juga bahwa elemen lembaga yang selama ini terlibat tidak semua diperlukan. Lembaga yang tidak diperlukan tersebut adalah lembaga yang hanya bertindak sebagai koordinator. Petani menghendaki kredit hanya ditangani oleh lembaga yang berfungsi secara langsung.
4. Lembaga yang dapat dipertimbangkan untuk menangani sistem perkreditan, adalah lembaga keuangan (perbankan), lembaga penjamin dan koordinator (asuransi dan atau PG), lembaga pengawas/pengendali (lembaga yang mewakili kepentingan pemerintah, PG dan petani).

B. Implikasi

1. Kecenderungan petani berlahan sempit untuk menyewakan lahannya, menyebabkan luas usahatani menjadi lebih besar walaupun cenderung terfragmentasi. Petani penyewa pada dasarnya memiliki kemampuan ekonomi yang lebih tinggi daripada petani yang menyewakan lahannya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan perkreditan tidak lagi harus menggunakan skema kredit yang bersifat umum, tetapi distratifikasi sesuai dengan keadaan lapangan dan ketersediaan dana kredit.
2. Skema kredit yang akan dibuat harus dirinci menjadi beberapa komponen kebutuhan dan prioritas pemberiannya berdasarkan tingkat kepentingannya dalam usahatani. Peringkat kepentingan komponen tersebut dari yang terpenting berturut-turut adalah pengadaan bahan, dan upah tenaga kerja.
3. Secara teknis, penyaluran kredit harus tepat waktu dan tepat jumlah agar kredit tersebut sesuai dengan peruntukannya, selain itu lembaga yang terlibat di dalam penyaluran kredit hanya lembaga-lembaga yang secara langsung menjalankan suatu fungsi tertentu.
4. Lembaga yang terlibat yaitu lembaga perkreditan, lembaga penjamin dan koordinator, dan lembaga pengawas/pengendali dengan skema penyaluran kredit sebagai berikut



DAFTAR PUSTAKA

- Dawson, S. 1996. *Analysing Organisations*. Third Edition. Macmillan Press Ltd. London. 296 p.
- Mosher, AT. 1968. *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*. Yasaguna Jakarta.
- Mubyarto. 1994. *Pengantar Ekonomi Pertanian, Edisi III, LP3ES*. Jakarta.
- Penry, D.H. 1975. *Farm Credit Policy in the Early Stages of Agricultural Development*. Australian National University.
- Robbins, S. 1994. *Teori Organisasi: Struktur, Desain, dan Aplikasi*. Terjemahan. Arcan. Jakarta.
- Ronodiwirjo, S. 1969. *Struktur Perkreditan Pertanian di Daerah Produksi Padi Karawang*. Disertasi Doktor IPB. Bogor.
- Sawit, H., P. Suharno, dan A. Rahman (Penyunting). 1999. *Ekonomi Gula Indonesia*. Penerbit Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Sugar Industry Development Team-BUMN*. 1999. *Study of the Indonesian Sugar Industry*. Vol I (Main Report) dan Vol II (Annexes). Booker Tate.

Lampiran 1. Skema 1 Pemberian Kredit Petani Tebu *)

Skala Usaha	Jenis Lahan	Jenis Tanaman	Komponen (ribu rupiah)							Total
			Benih	Pupuk	PHT	Panen	Lahan	Air	CoL	
UK	Sawah	PC	900	1 450	150	1 600	2 000	200	350	6 650
		R	100	1 450	150	1 600	1 600	200	350	5 450
	Tegal	PC	900	1 450	150	1 600	1 400	500	350	6 350
		R	100	1 450	150	1 600	1 150	500	350	5 300
UM	Sawah	PC	900	1 450	150	1 600	0	0	0	4 100
		R	100	1 450	150	1 600	0	0	0	3 300
	Tegal	PC	900	1 450	150	1 600	0	0	0	4 100
		R	100	1 450	150	1 600	0	0	0	3 300
UB	Sawah	PC	0	0	0	0	0	0	0	0
		R	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tegal	PC	0	0	0	0	0	0	0	0
		R	0	0	0	0	0	0	0	0

Lampiran 2. Skema 2 Pemberian Kredit Petani Tebu *)

Skala Usaha	Jenis Lahan	Jenis Tanaman	Komponen (ribu rupiah)							Total
			Benih	Pupuk	PHT	Panen	Lahan	Air	CoL	
UK	Sawah	PC	900	1 450	150	1 600	2 000	0	0	6 100
		R	100	1 450	150	1 600	1 600	0	0	4 900
	Tegal	PC	900	1 450	150	1 600	1 400	0	0	5 500
		R	100	1 450	150	1 600	1 150	0	0	4 450
UM	Sawah	PC	900	1 450	150	0	0	0	0	2 500
		R	100	1 450	150	0	0	0	0	1 700
	Tegal	PC	900	1 450	150	0	0	0	0	2 500
		R	100	1 450	150	0	0	0	0	1 700
UB	Sawah	PC	0	0	0	0	0	0	0	0
		R	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tegal	PC	0	0	0	0	0	0	0	0
		R	0	0	0	0	0	0	0	0

Lampiran 3. Skema 3 Pemberian Kredit Petani Tebu *)

Skala Usaha	Jenis Lahan	Jenis Tanaman	Komponen (ribu rupiah)							Total
			Benih	Pupuk	PHT	Panen	Lahan	Air	CoL	
UK	Sawah	PC	900	1 450	150	1 600	2 000	0	0	6 100
		R	100	1 450	150	1 600	1 600	0	0	4 900
	Tegal	PC	900	1 450	150	1 600	1 400	0	0	5 500
		R	100	1 450	150	1 600	1 150	0	0	4 450
UM	Sawah	PC	0	0	0	0	0	0	0	0
		R	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tegal	PC	0	0	0	0	0	0	0	0
		R	0	0	0	0	0	0	0	0
UB	Sawah	PC	0	0	0	0	0	0	0	0
		R	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tegal	PC	0	0	0	0	0	0	0	0
		R	0	0	0	0	0	0	0	0

*) Keterangan:

UK = Usahatani Skala Kecil (< 2 ha)

UM = Usahatani Skala Menengah (2-5 ha)

UB = Usahatani Skala Besar (> 5 ha)

(Fragmentasi lahan usaha diabaikan)

PC = Plant Cane

R = Ratoon